

DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS SMP DAN SMA SWASTA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2009)

Saifuddin Zuhri, Zaenal Abidin

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Otonomi dimaksudkan agar sekolah mempunyai kebebasan yang lebih dalam mengatur diri, pengembangan potensi, meningkatkan kinerja personel untuk membuka diri lebih luas terhadap partisipasi masyarakat atau stakeholder. Hal tersebut masih menjadi permasalahan bagi sekolah kecil maupun besar, terutama berkaitan dengan input siswa, yang pada kenyataannya keputusan mereka memilih sekolah (second choice), partisipasi masyarakat, peran komite sekolah dan tuntutan bagi guru untuk mengajar 24 jam/minggu.

Penelitian ini akan meneliti tentang rekrutmen dan penentuan kualitas guru, kesejahteraan, rasio antara guru dan jumlah kelas serta pembinaan supervise guru di SMP dan SMA Swasta di Sukoharjo. Proporsi kewenangan sekolah dalam memanaj pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah SMP dan SMA Swasta di Sukoharjo dilakukan oleh sekolah dan yayasan mengenai hal-hal yang terkait dengan rekrutmen penentuan kualifikasi guru, kesejahteraan, rasio guru dan jumlah kelas, supervise, pembinaan guru dan sarana dan prasarana, hal bergantung penuh

oleh kebijakan sekolah. Sedangkan kewenangan yang lebih besar dalam pengembangan Sumber Daya Manusia sepenuhnya ditangani oleh Sekolah, di samping ada supervisor yayasan dan PEMDA. Sekolah swasta yang diteliti memiliki proporsi yang maksimal dalam memanaj Sumber Daya Manusia, hal ini dapat dilihat dari peran sekolah dalam perekrutan dan pembinaan serta pemenuhan kesejahteraan guru.

Kata Kunci: *desentralisasi, otonomi, sekolah swasta*

Pendahuluan

Masyarakat, sekolah dan nilai adalah tiga faktor penting yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan regenerasi. Ketiga faktor tersebut tergambar dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (PRO-PENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam pendidikan di Indonesia yaitu 1) mempertahankan hasil pembangunan pendidikan yang telah tercapai, 2) mempersiapkan sumber daya yang kompeten dan mampu bersaing di pasar global, 3) sejalan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat (Hasbullah, 2007: 1).

Kehadiran UU Nomor 32 tahun 2004 (dimulai dengan UU Nomor 29 tahun 1999) tentang pemerintah daerah dimana sejumlah kewenangan telah

diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan (Hasbullah, 2007: 2).

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dan dikuatkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah disertai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat sendiri di setiap daerah (Otonomi Daerah).

Kewenangan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, monev, fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya (Mulyasa, 2003: 211).

Kewenangan pemerintah yang berlaku di berbagai bidang selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (3) meliputi di antaranya:

1. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dari sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan.
2. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, asahan dan supervisi (Mulyasa, 2003: 203).

Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom pasal 2 tentang pendidikan antara lain:

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
2. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan (Mulyasa, 2003: 199).

Menguatnya otonomi dan desentralisasi pendidikan berarti hal-hal yang semula diatur dari pusat dengan sifat-sifat yang melekat yaitu serba seragam, monoton, mengabaikan keanekaragaman model “top down”, berubah menjadi sebaliknya (Hasbullah, 2007: 2).

Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam

pengelolaan pendidikan.

Meskipun desentralisasi pendidikan merupakan keharusan, namun dalam realitasnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak atau belum disertai dengan kesiapan-kesiapan terarahnya pada manajemen berbasis sekolah baik menyangkut sumber daya manusia (pendidik), menyangkut paradigma terhadap filosofi perubahan pendidikan, manajemen sekolah yang belum mendukung adanya perubahan, belum tersosialisasikan secara tuntas baik secara konsep atau operasional teknis, sarana prasarana belum dikondisikan dengan kurikulum, kurang berfungsinya komite sekolah dan minimnya kepala sekolah yang berkompentensi terhadap bawahannya yang memiliki bidang ilmu yang berbeda.

Para guru agama menjalankan tugas masih pada sebatas mekanistik belum bisa mengambil makna dari sebuah kebijakan. Contoh, pembuatan perangkat administrasi akademik yang berujud RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

Guru PAI mengikuti begitu saja apa yang menjadi konsep MGMP, fungsi MGMP berubah menjadi penentu kurikulum tingkat daerah yang berarti filosofi kurikulum pembelajaran yang hendak didesentralisasikan menjadi kembali tersentralisasi di tingkat daerah (Abidin, 2007: 54) hanya memindah kebijakan dari pusat ke daerah belum dimaknai otonomi sekolah karena SDM guru dan kepala sekolahnya belum siap mandiri.

Otonomi dimaksudkan, sekolah lebih leluasa dalam pengelolaan, pengembangan potensi, peningkatan kinerja para personel, membuka diri adanya partisipasi masyarakat atau stakeholder. Hal ini masih menjadi masalah juga yang berkaitan dengan input siswa termasuk SDM nomor dua (secara *secand choise*) pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran masih berkuat pada paradigma lama, baik terhadap cara mengajar maupun persepsi terhadap siswa yang masih dianggap sebagai objek, seperti mengisi gelas kosong, hanya pada pengembangan kognitif, menganggap siswa itu sama kondisinya dan sebagainya.

Sisi lain kekurangan guru yang tidak bisa dipenuhi dengan merekrut tenaga baru sendiri (diatur Pemda/diknas) guru yang *mis match* anggaran APBD yang masih belum mencukupi kebutuhan, kurang mempunyai bergaining dengan pemerintah daerah, kurang komunikatif yang baik antara Departemen Agama dengan pemerintah daerah menyangkut pembiayaan lembaga pendidikan yang menjadi binaannya. (Hasbullah, 2007: 149-151).

Otonomi pendidikan merupakan kekuatan madrasah sekaligus sebagai kelemahan, jika tidak dibarengi kepemimpinan madrasah yang *visioner* dan mampu mengelola perubahan, hal ini tantangan dan memaksa madrasah untuk terus berbenah dan melakukan reorientasi terhadap tujuan metode pembelajaran materi pembelajaran dan sebagainya (Hasbullah, 2007: 164-165).

Beberapa penelitian yang menyangkut hubungannya dengan pendidikan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:

Imam Najamuddin (2008) dengan judul *Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Terpadu Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Sunan Kalijaga Baluarti Surakarta*, berkesimpulan : 1) Kepala sekolah memberi kesempatan kepada para guru untuk dikirim dalam kegiatan workshop, seminar, lokakarya. 2) Penyediaan sarana prasarana belum maksimal. 3) Guru tidak mempersiapkan administrasi akademik secara standar, 4) Guru belum menjalankan pembelajaran dengan strategi yang variatif, 5) Guru belum mandiri membuat RPP untuk kesiapan mengajar, 6) Guru belum banyak yang memiliki kualifikasi mengajar secara profesional, kompetensi paedagogik, sedang kompetensi sosial dan kepribadian cukup bagus.

Abdullah Aly (2006), dengan judul *Peranan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di wilayah Surakarta. Lembaga yang diteliti meliputi Madrasah Negeri maupun swasta, dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai Aliyah. Analisa data secara induktif didapat kesimpulan, bahwa peranan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama (Islam) sebenarnya sangat strategis, yaitu dalam rangka pembinaan mental kader bangsa yang *berakhlaqul*

karimah. Namun disayangkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Madrasah-madrasah di Surakarta masih sangat berat, terutama yang menonjol adalah mengenai rendahnya prestasi input siswa, daya saing yang kurang kompetitif dengan sekolah umum, lemahnya kualitas sumber daya yang tersedia, keadaan rata-rata ekonomi siswa yang lemah, masalah keterbatasan dana, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Keberadaan madrasah yang di luar jangkauan wilayah otonomi Pemerintah Daerah semakin memperlemah perkembangan lembaga pendidikan tersebut dalam memerankan diri di tengah persaingan sekolah umum yang memperoleh dukungan dan perhatian penuh dari Diknas Pendidikan setempat.

Undang-undang No. 20/2003 Sisdiknas pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah adanya standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan.

Lembaga pendidikan di Sukoharjo yang dikelola oleh swasta cukup banyak, bahkan yayasan yang berlatar pada sosial keagamaan cukup banyak, sehingga otonomi pendidikan yang diberlakukan di kabupaten Sukoharjo cukup terasa dampaknya dari semua aspek.

Lembaga pendidikan di Sukoharjo telah memperoleh otonomi penge-

lolaan sekolah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, dengan adanya kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah selain membawa keuntungan terutama sekolah-sekolah negeri, yang mana mereka mendapat kucuran dana dari pemerintah sehingga sekolah-sekolah Negeri dapat mengambil kebijakan untuk membebaskan biaya SPP. Sedangkan di sisi lain membawa kerugian kepada sekolah-sekolah swasta, yakni dengan adanya penurunan animo orang tua untuk mensekolahkan anaknya di sekolah swasta, selain biaya juga akibat dari sekolah-sekolah Negeri yang membuka kelas baru, untuk pemenuhan 24 jam mengajar per minggu.

Melihat kondisi tersebut sangat menarik untuk diteliti, tentang bagaimana kesiapan sekolah swasta di era Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sehingga hasil penelitian tersebut akan dapat membantu bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai bahan pijakan untuk menetapkan kebijakan baru bagi penentu, pengambil kebijakan.

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang disajikan penulis di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah rekrutmen dan penentuan kualifikasi guru, kesejahteraan, rasio dan pembinaan supervisi guru di SMP dan SMA swasta di Sukoharjo Tahun 2009.
2. Bagaimana proporsi kewenangan sekolah dalam memanaj SDM.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pola rekrutmen dan penentuan kualifikasi guru, kesejahteraan, rasio dan pembinaan supervisi guru di SMP dan SMA swasta di Sukoharjo Tahun 2009.
2. Proporsi kewenangan sekolah dalam memanaj SDM.

Manfaat penelitian

1. Dapat melihat secara realistis posisi sekolah-sekolah swasta tentang kekuatan dan kelemahannya di era otonomi daerah.
2. Sebagai bahan pijakan untuk menetapkan kebijakan baru bagi penentu, pengambil kebijakan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian lapangan di SMP dan SMA Swasta di Sukoharjo dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Lexy J. Meleong, 1995 : 3).

2. Metode Penentuan Subjek Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1992: 102). Populasi merupakan universal yang dapat berupa orang, benda atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti. Populasi dapat dibedakan menjadi dua kategori,

yaitu populasi target (*target population*) dan populasi survey (*survey population*). Populasi target adalah seluruh unit populasi, sedang populasi *survey* adalah sub unit dari populasi penelitian (Sudarman, 2000: 87). Dalam penelitian ini menggunakan populasi survey, yang dijadikan subjek penelitian adalah lembaga pendidikan swasta yang berada di Sukoharjo.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

a. Metode *interview*

Penelitian ini menggunakan metode *interview* terpimpin (*Guide interview*) yaitu *interview* yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci (Arikunto, 1992: 127). Metode *interview* ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai seputar rekrutmen dan penentuan kualifikasi guru, kesejahteraan, rasio dan pembinaan supervisi guru serta proporsi kewenangan sekolah dalam memanaj SDM.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Arikunto, 1992: 234). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang seputar

rekrutmen dan penentuan kualifikasi guru, kesejahteraan, rasio dan pembinaan supervisi guru serta proporsi kewenangan sekolah dalam memanej SDM.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian (Nawawi, 1990 : 100)

Metode ini digunakan untuk mengamati letak geografis sekolah, lingkungan, kondisi, situasi pembelajaran dan lain-lain. Dalam penelitian ini sekolah yang diobservasi adalah: SMP Muh 1 Sukoharjo, SMP Kristen Kartasuro, *SMP Al-Islam 1* Kartasuro, SMP dan SMA Al-Firdaus Sukoharjo, SMA Veteran 1 Sukoharjo,

4. Metode analisis data

Analisis data menurut Lexy J. Moleong (1995: 112) adalah *proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu rumusan pada kategori dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan untuk menganalisis data.*

Untuk menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif, artinya, data yang muncul berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yaitu melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi yang diproses melalui pencatatan dan lain-lain kemudian disusun dalam teks yang diperluas (Miles, MB and AM Huberman, 1992: 26).

Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis yang terdiri dari tiga tahap yaitu: 1) *Reduksi data*, 2) *Pernyajian data*, 3) *Penarikan simpulan atau verifikasi* (Miles, MB and AM Huberman, 1992: 16).

Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah reduksi data yaitu menggroupkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga, penarikan simpulan dari data yang telah disajikan pada tahap ke dua dengan mengambil simpulan.

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju pada pernyataan yang sifatnya umum (Arikunto, 1992: 159). Adapun metode induktif adalah cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya khusus (Hadi, 1993: 97)

Hasil dan Pembahasan

Rekrutmen dan penentuan kualifikasi guru, kesejahteraan, rasio dan pembinaan supervisi guru, proporsi kewenangan sekolah dalam memanej

SDM di SMP dan SMA swasta di Sukoharjo Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo

Rekrutmen dan kualifikasi guru SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah dari rekomendasi Majelis Dikdasmen. SMP Muhammadiyah ini memperoleh bantuan guru bantu sejumlah 4 (empat). Jumlah guru yayasan 22 karyawan 5. Sedangkan guru yang diperbantukan dari Depag dan yang bersertifikasi belum ada, kecuali Kepsek.

Penggajian untuk kesejahteraan para guru berdasarkan jam mengajar di sekolah dan mendapatkan dana BOS dan Dasismis, yaitu dana untuk siswa miskin.

Untuk pembinaan guru adalah dengan adanya pengawas yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, pengawas dari Dinas, dan dari pusat. Di dalam pengawasan, Kepala Sekolah mengadakan pembinaan tentang pembuatan RPP yang selama ini masih tergantung dari produk MGMP Kabupaten.

Kendala dalam proses belajar mengajar (PBM) di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah belum memiliki KTSP dan buku pegangan. Sedangkan kurikulum lokal (kurlok) ditentukan dari kabupaten, yang terdiri dari Mata Pelajaran (mapel) elektronika dan Bahasa Jawa.

Proporsi kewenangan sekolah dalam memanaj SDM dan otonomi

sekolah tentang rasio guru dengan siswa tergolong belum bisa memenuhi 24 jam mengajar perminggu, karena kelas dalam kelompok kecil. Jumlah keseleruhan ada 8 kelas dan kelas 1 termasuk kelas kecil.

Penurunan animo siswa baru salah satunya diakibatkan dari sekolah-sekolah Negeri yang membuka kelas baru, untuk pemenuhan 24 jam mengajar per minggu dan sekolah gratis.

Upaya-upaya yang dilakukan sekolah untuk menghadapi UAN yaitu dengan diadakannya les, *try out* dan pemadatan. Sedangkan keberadaan komite masih sebatas formalitas, belum ada kontribusinya.

Untuk sarana dan prasarana bantuan tambahan klas (gedung baru/rehab klas) satu ruang dari Dinas, namun untuk perpustakaan masih mengalami kekurangan jumlah eksemplar buku dan judulnya.

Untuk pengembangan sarana dan prasarana diperoleh dengan dana BOS yang diwujudkan dalam bentuk buku dan untuk membeli buku sudah ditetapkan buku-buku tertentu dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar.

Bantuan siswa miskin dijatah 11 anak, untuk anak @. 288.000,- untuk SPP dan dari propinsi berwujud LKS, sedangkan dana APBD tidak ada. Anak miskin mendapatkan uang saku dari BOS. Sekolah Mendapatkan bantuan dari wali murid beruba paving (wawancara dengan Kep Sek, Bapak Sri Setiarso, SPd, pada tanggal: 18 Mei 2009).

2. SMP Kristen Kartasuro Sukoharjo

Rekrutmen dan kualifikasi guru SMP Kristen Kartasuro-Sukoharjo adalah belum bisa memenuhi guru yang sesuai dengan kualifikasi, kecuali guru yang mengajar mata pelajaran untuk Ujian Akhir Nasional (UAN).

Jumlah guru yang diperbantukan berjumlah 4 (empat) orang, untuk guru honorer (tidak tetap) berjumlah 9 orang, sedangkan untuk guru yayasan adalah berjumlah 3 orang. Khusus guru agama direkut dari yayasan sendiri.

Untuk guru yang masuk ke data-base belum ada dan guru yang sudah mendapat sertifikasi adalah baru 1 orang, yaitu Kepala Sekolah.

Pemenuhan kesejahteraan guru sekolah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sistem peng-gajian guru SMP Kristen Kartasuro-Sukoharjo sepenuhnya dari yayasan.

Khusus untuk anak-anak miskin ada dana siswa miskin (dasismis), yang memperoleh dana siswa miskin adalah sejumlah 10 anak dengan cara setiap tahun mengajukan ke APBD.

Pembinaan guru dilakukan melalui MGMP dari pengawas, dari Kepsek yang dilakukan persemester, yang terkait dengan persiapan dan proses pembelajaran.

Perkembangan jumlah murid di SMP swasta pada umumnya dan SMP Kristen khususnya menurun, hal ini disebabkan karena masyarakat untuk menyekolahkan anaknya lebih ber-

orientasi pada sekolah negeri karena Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki program sekolah gratis untuk Sekolah Negeri di wilayah Sukoharjo.

Oleh karena itu untuk memenuhi tuntutan mengajar 24 jam/minggu, diupayakan kelas besar dipecah menjadi kelas kecil yang berkapasitas kurang lebih 30- an anak didik.

Kurikulum lokal (kurlok) SMP Kristen Sukoharjo adalah Mata Pelajaran (mapel) Bahasa Daerah, Tata Boga, Elektronika,

Dalam pengembangan sarana dan prasarana, sekolah tidak punya donator tetap tetapi mempunyai komite sekolah sebagai patner kerja sekolah dan yayasan. Untuk sekolah menjalin dengan yayasan dan bergabung dengan sekolah-sekolah Kristen yang lain. Sekolah SMP kristen menerima rehab ruang dari gubernur melalui Dinas (wawancara dengan KepSek, Bapak Kasino, BA, pada tanggal 25 Mei 2009).

3. SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo

Rekrutmen guru SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo adalah sesuai dengan kualifikasi disiplin ilmu dengan mata pelajaran yang diampu oleh para guru. Untuk rekrutmen guru dipilih yang memiliki loyalitas terhadap Islam dan memenuhi kualifikasi (tidak *mismatch*), namun semua guru belum memperoleh sertifikasi kecuali hanya 1 guru yakni Kepala Sekolah.

Rasio guru dengan siswa sudah ideal. Untuk perekrutan guru dengan menggunakan sistem kontrak, dengan lama kontrak selama 2 tahun. Selama waktu itu tidak kapabel dan tidak memiliki semangat maka akan dilepas (diputus kontraknya). Kualifikasi Sumber Daya Manusia untuk guru di SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo belum terpenuhi.

Untuk rekrutmen dan mengangkat guru baru di SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo yang memiliki wewenang adalah pengurus komite dan yayasan.

Jumlah guru SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo terdiri dari guru yang diperbantukan dari Diknas berjumlah 4 orang dan guru honorer (GTT) berjumlah 14 orang.

Kesejahteraan guru digaji melalui yayasan penuh, sedangkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengembangkan operasional sekolah. Penggajian sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Sedangkan pemerintah hanya memberi insentif.

Pembinaan untuk guru dari Dinas secara isendental. Dalam proses supervisi hampir tidak ada masalah, tetapi kadang-kadang pedoman buku dari Diknas belum ideal menurut kurikulum di sekolah Al-Islam.

Kurikulum SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo mengacu kepada pemerintah, di samping juga memiliki mulok (muatan lokal) yaitu: Bahasa Jawa, Bahasa Arab, Elektro, dan Tata Boga.

Proporsi guru mengajar sudah mencapai standar sertifikasi dengan mengajar 24 jam per minggu.

Pengembangan sarana dan prasarana SMP al-Islam mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan anak miskin, di samping itu ada donatur tetap dari anggota komite secara isendental. Untuk keperluan sarana-prasarana memperoleh bantuan dari pemerintah berwujud rehab kelas baru. Selama ini mendapat 3 kali bantuan dengan rincian 30 juta untuk 6 kelas. Rehab kelas baru dan rehab gedung mendapat dana dari yayasan. (Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Subakhir, BA, pada tanggal: 25 Mei 2009).

4. SMP dan SMA Al-Firdaus Sukoharjo

Rekrutmen guru berdasarkan kualifikasi oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Firdaus. Tenaga guru sesuai dengan kualifikasi ijazah dan memiliki ketrampilan bahasa (Arab dan Inggris) serta memiliki wawasan keagamaan yang cukup. Tidak ada guru yang *mismatch*. Guru SMP dan SMA Al-Firdaus Sukoharjo yang telah bersertifikasi berjumlah 2 orang selebihnya adalah guru yayasan, diantaranya adalah tenaga kontrak, magang, percobaan, tetap (dengan ketentuan tiap semester) bisa naik jenjang. Jumlah keseluruhan guru ada 30 orang dan jumlah siswa perkelas 20 anak (kelas kecil).

Kesejahteraan guru dipenuhi oleh yayasan, dengan acuan standar seperti

PNS, tiap jenjang melalui proses (penilaian DP3). Untuk bisa naik jenjang yakni dari tenaga percobaan ke tenaga tetap adalah dengan persyaratan menyusun portofolio.

Untuk perekrutan guru yakni dengan prosedur melalui Kepala Sekolah kemudian usulan dari Kepala Sekolah ditetapkan oleh yayasan. Untuk mendapatkan pendapatan dari APBD guru harus masuk kualifikasi untuk mengabdikan 5 tahun. Sedangkan untuk memperoleh tunjangan fungsional seorang guru harus mengajar minimal 24 jam.

Supervisi/pembinaan dalam hal pembelajaran sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah, Yayasan. Di samping Kepala Sekolah dan juga Yayasan supervisi/pembinaan juga dilakukan oleh Dinas dan Depag.

Mengenai pembuatan silabus dan RPP dibuat oleh guru masing-masing dalam persemester (4 bulan). Untuk kelas 3 mengacu ke kurikulum umum. Untuk kasus kelas 3, ketika mereka yang sudah memasuki tengah semester (mid semester) maka sekolah menyiapkan mereka untuk menghadapi ujian. Sedangkan untuk kelas SMA diprogram dengan kategori, 2 tahun untuk teori dan 1 tahun untuk *life skill*, magang dan persiapan ujian.

Pemagangan dan *life skill* bekerjasama dengan ASDI (Akademi Seni Desain Indonesia) dalam bidang desain grafis. *Life skill* fothografis bekerja sama dengan studio photo Matahari Solo. Sedangkan *life skill* jurnalistik bekerjasama

dengan SOLO Pos. Semua life skill diberi sertifikat oleh dunia usaha tempat mereka praktek.

Kurikulum mengacu kepada KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) di samping ada muatan kurikulum dari Depag, Dinas, dan inovasi kurikulum dari Al-Firdaus. Kurikulum Muatan lokal yaitu: Bahasa Arab, Desain Grafis, fothografis, Jurnalistik.

Rekrutmen siswa di samping model penerimaan siswa baru secara reguler juga mengambil anak yatim piatu dan dhuafa. Dengan rincian setiap tahun mengambil 2 orang dari yatim piatu dan dhuafa dengan konsekuensi beban pembiayaan dibebaskan. Untuk membiayai anak yang yatim dan dhuafa menggunakan sistem subsidi silang.

Untuk memanjakan 2 lembaga yang dibangun dalam satu atap dikepalai oleh satu Kepala Sekolah, dengan didampingi oleh Komite Sekolah secara efektif.

Sekolah memperoleh subsidi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Block Grand. Sedangkan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sepenuhnya oleh yayasan (Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Supardi, M. Ag., pada tanggal: 4 Juni 2009).

5. SMA Veteran I Sukoharjo

Rekrutmen guru SMA Veteran I Sukoharjo dengan menggunakan kualifikasi yakni standar minimal S1 Keguruan atau S1 non keguruan plus akta IV. Khusus untuk rekrutmen guru Agama

adalah dari Depag (diperbantukan) namun dikarenakan kekurangan jumlah guru Agama, oleh sekolah diambil kebijakan dengan memenuhi sendiri, begitu juga untuk guru umum.

Pemenuhan kesejahteraan guru di SMA Veteran 1 Sukoharjo, untuk guru honorer dibiayai oleh yayasan. Jika ada insentif dari pemerintah/kabupaten mereka mendapatkan kesejahteraan Rp. 100.000,- per orang dengan kualifikasi bagi guru yang sudah masuk ke *database*.

Supervisi/pembinaan dilakukan di kelas sebagai penanggungjawab unit kerja (kep sek/guru senior) yang ditugasi sebagai supervisi persemester. Pembinaan juga dilakukan dari Dinas yang secara keseluruhan membimbing dari bagian administrasi sampai kelas untuk di sampaikan ke guru-guru.

Model supervisi yang dilakukan adalah berkaitan dengan:

- Membimbing pembuatan RPP yang mengacu kepada PAIKEM KTSP.
- Proses pembelajaran di kelas dan evaluasi.
- Pembinaan performance guru yang dituntut untuk memenuhi kompetensi kepribadian dan sosial.

Proses pembimbingan dilakukan dengan cara bertahap mulai dari sosialisasi KTSP dari Pusat secara global kemudian secara detail disampaikan di sekolah dengan cara workshop.

Silabus dibuat guru masing-masing sesuai kurikulum sekolah, khusus penyusunan

kurikulum lokal (kurlok) pemerintah memberikan garis besarnya saja sedangkan sekolah menjabarkannya.

Proporsi kewenangan sekolah dalam penjaminan mutu sudah sesuai atau berkualifikasi, hal tersebut terlihat dengan rasio guru dan siswa yang ideal berdasar kelas standar sertifikasi (dengan ketentuan kurang lebih perkelas 30 siswa). Jumlah mengajar perguru 24 jam mengajar/minggu, bagi guru yang mengajarnya kurang dari 24 jam yang berkualifikasi guru IPA dikompensasikan ke pekerjaan laboratorium dan guru IPS dikompensasikan ke koperasi siswa, sedang guru informatika komunikasi dikompensasikan ke pengelolaan laboratorium komputer.

Pegawai Negri Sipil (PNS) yang diperbantukan adalah berjumlah 3 orang dari Diknas dan 1 orang berasal dari Depag, Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) berjumlah 7 orang, guru tetap yayasan berjumlah 6 orang, guru yang sudah bersertifikasi berjumlah 7 orang, dan lainnya adalah guru honorer.

Pengembangan sarana dan prasarana untuk renovasi gedung, laboratorium, dan perpustakaan mendapatkan subsidi dari pemerintah (Wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Heru, M.Pd, pada tanggal: 18 Mei 2009).

Sejumlah lembaga pendidikan swasta di sukoharjo yang menjadi obyek penelitian dianalisis berdasarkan pada permasalahan yang diangkat yakni kualifikasi guru, pengawasan dan pem-

binaan guru, kurikulum, pembiayaan penyelenggaraan, komite sekolah (partisipasi masyarakat), kesejahteraan sekolah, rasio jam mengajar, sarana dan prasarana diperoleh hasil;

Pertama, tentang kualifikasi guru. Bagi SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo, dari segi pemenuhan kualifikasi guru sepenuhnya diangkat oleh yayasan berdasarkan kualifikasi tamatan bidang keahlian ilmu. Sedangkan untuk pemenuhan kualifikasi sertifikasi guru baru satu yakni Kepala Sekolah.

SMP Kristen Kartasura-Sukoharjo, pemenuhan kualifikasi guru sepenuhnya diangkat oleh yayasan, sedangkan untuk pemenuhan guru yang sesuai dengan bidang keilmuannya (keahliannya) baru terpenuhi pada mata pelajaran untuk ujian Nasional (UAN). Guru Mata Pelajaran (MAPEL) belum terpenuhi sesuai dengan keahliannya (*mismatch*). Untuk pemenuhan kualifikasi sertifikasi guru baru satu yakni Kepala Sekolah.

SMP Al-Islam Kartasura-Sukoharjo, pemenuhan kualifikasi guru sepenuhnya diangkat oleh komite sekolah dan Yayasan dengan sistem kontrak selama 2 tahun. Selama masa kontrak dipandang kapabel dan memiliki semangat dan loyalitas terhadap Islam yang tinggi akan diperpanjang kontraknya. demikian juga sebaliknya. Sedangkan kualifikasi sertifikasi guru baru satu yakni Kepala Sekolah saja.

SMP-SMA Al-Firdaus Sukoharjo, pemenuhan kualifikasi guru

sepenuhnya diusulkan oleh Kepala Sekolah dan diangkat oleh Yayasan, kualifikasi sesuai dengan ijazah tamatan yang sesuai dengan keahliannya (bidangnya) dan memiliki ketrampilan dua bahasa (Arab dan Inggris) serta memiliki wawasan keagamaan yang cukup. Guru Mata Pelajaran (MAPEL) mengajar sesuai dengan bidangnya. Di samping itu pengangkatan guru berdasarkan kualifikasi tenaga kontrak, tenaga magang, percobaan dan tetap, dengan ketentuan tiap semester dievaluasi perjenjang. Untuk kualifikasi sertifikasi guru baru dua yakni Kepala Sekolah dan guru senior.

SMA Veteran 1 Sukoharjo, pemenuhan kualifikasi guru diangkat oleh Yayasan berdasarkan pada bidang yang sesuai dengan keahliannya atau yang tidak sesuai dengan ijazah SI tetapi dilengkapi dengan akta IV. Untuk pemenuhan kualifikasi sertifikasi sejumlah 7 orang guru.

Undang-undang No. 20/2003 Sisdiknas pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah adanya *Standar pendidik dan tenaga kependidikan* adalah mencakup kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hasil dari data yang diperoleh menerangkan bahwa guru-guru sekolah tersebut diatas telah memenuhi kualifikasi profesi keahlian, kecuali SMP Kristen Sukoharjo, yakni hanya guru yang mengajar Mata pelajaran UAN yang menjadi mata uji negara. Sedangkan untuk sertifikasi masing-masing sekolah baru Kepala sekolah saja, kecuali SMA Veteran 1 Sukoharjo. Dengan demikian sekolah-sekolah swasta tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 20/2003 Sisdiknas pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Kedua, Pembinaan, Supervisi dan Pengawasan Guru, telah dilakukan oleh semua sekolah dan pihak Pemerintah, baik Dinas, Depag Kabupaten maupun Dinas Propinsi, sedangkan untuk SMP dan SMA Al-Firdaus, pembinaan, supervisi dan pengawasan guru juga dilakukan oleh yayasan, dan untuk SMA Veteran dilakukan juga oleh guru senior. Pelaksanaan pembinaan, supervisi dan pengawasan dilakukan secara rutin baik, terjadwal atau insidental.

Sasaran pembinaan, supervisi dan pengawasan berkaitan dengan persiapan mengajar (RPP), *performance* mengajar untuk memenuhi kompetensi profesional, kepribadian dan sosial, pembuatan silabus, serta proses pembelajaran di kelas dan evaluasi.

Dengan demikian pembinaan, supervisi dan pengawasan guru di sekolah-sekolah tersebut di atas sudah dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan sekolah dan guru (UU

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 35 ayat 1) dan keputusan menteri RI Nomer 162/13/2003 tentang pedoman penugasan guru sebagai kepala sekolah, pasal 9 ayat 2, bahwa penilaian kepala sekolah atas dasar tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.

Ketiga, Kurikulum. Kurikulum yang dibebankan oleh setiap lembaga pendidikan di atas mengacu kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bermuatan kurikulum nasional yang harus dijadikan acuan oleh setiap sekolah tetapi juga diberi kewenangan untuk mengadakan dan melaksanakan kurikulum lokal. Untuk SMP dan SMA Al-Firdaus kurikulum Nasional merujuk kepada KTSP, Kurikulum dari Depag, Kurikulum Sekolah Kejuruan, keislaman terpadu dan kurikulum pengembangan Bahasa Asing. Sedangkan program pembelajarannya ditambah pengembangan kompetensi dasar, keislaman dan pembentukan akhlak, pengembangan diri, pengembangan *life skill* dan pemagangan. SMA Al-Firdaus di program 2 tahun untuk teori dan 1 tahun untuk *life skill*, magang dan persiapan ujian negara.

Menurut Undang-undang No. 20/2003 Sisdiknas pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah adanya *Standar Isi* yakni mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang: kompetensi tamatan, kompetensi mapel, kerangka dasar dan

struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, kalender akademik.

Keseluruhan sekolah yang diteliti masing-masing memiliki kurikulum lokal yang dibebankan oleh Dinas Kabupaten Sukoharjo yaitu Pelajaran Bahasa Daerah. Sedangkan untuk sekolah-sekolah tertentu, seperti SMP dan SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo ditambah Mapel Elektronika, SMP Kristen Sukoharjo, ditambah Mapel Tata Boga, SMP Al-Islam ditambah Mapel Bahasa Arab, SMP dan SMA Al-Firdaus ditambah *life skill*, dan pemagangan. Dengan demikian kurikulum sekolah tersebut di atas, untuk kurikulum nasional belum 100 % mengacu kepada KTSP dan kurikulum lokal cukup variatif terutama SMP Al-Islam dan al-Firdaus.

Keempat, Pembiayaan Operasional sekolah (sekolah, guru, dan siswa). Menurut Undang-undang No. 20/2003 Sisdiknas pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan tentang *Standar pembiayaan*, adalah berkenaan dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan model kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi meliputi; gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa teleko-

munikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.

Beberapa sekolah swasta di Kabupaten Sukoharjo yang diteliti dalam pembiayaan operasional sekolah adalah:

- a. **Sekolah**, semua sekolah pembiayaan operasionalnya ditanggung oleh masing-masing penyelenggara (yayasan). Khusus SMP dan SMA Al-Firdaus mendapatkan dana operasional sekolah dari BOS dan Block Grand.
- b. **Guru**, Guru digaji oleh Yayasan melalui sekolah sesuai dengan kriteria kemampuan dari masing-masing sekolah berdasar pada beban mengajar 24 jam/minggu, di samping itu memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah dan dana BOS. Juga masih ada proporsi mengajar yang belum mencapai 24 jam mengajar per-minggu, yaitu SMP Muhammadiyah Sukoharjo dan SMP Kristen.
- c. **Siswa**, siswa memperoleh bantuan kesejahteraan murid (BKM) bagi yang tidak mampu dari masing-masing sekolah. Untuk sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo memperoleh bantuan siswa miskin dijatah 11 anak @ Rp. 288.000,- yang dialokasikan untuk pembiayaan SPP dan LKS, walaupun tidak memperoleh dana APBD. SMP Kristen Kartasura memperoleh dana miskin sejumlah 10 anak dengan cara setiap tahun mengajukan ke APBD. SMP

Al-Islam Sukoharjo, mendapatkan tambahan dana dari donatur tetap untuk siswa miskin dari Komite Sekolah secara insidental. SMP dan SMA Al-Firdaus, bahwa siswa yatim piatu dan *dhuafa* dibebaskan pembiayaan sekolah, pembiayaan mereka dilakukan dengan sistem subsidi silang, dengan demikian manajemen siswa yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah walaupun sekolah gratis di Sukoharjo berpengaruh terhadap animo siswa masuk sekolah swasta. Dengan demikian pembiayaan operasional sekolah sudah sesuai dengan Undang-undang tersebut di atas.

Kelima, Komite Sekolah. Hampir semua sekolah yang diteliti memiliki lembaga komite sekolah, akan tetapi hanya beberapa sekolah yang memiliki organisasi komite sekolah sebagai wujud partisipasi masyarakat dan khususnya orang tua yang efektif (berperan sebagaimana fungsinya), antara lain: SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan menambah ruang kelas dan paving halaman sekolah, SMP Al-Islam Sukoharjo dengan menambah ruang kelas dan memberi subsidi secara insidental bagi siswa yang kurang mampu, SMP dan SMA Al-Firdaus, dengan memungut biaya pengadaan gedung. Sedangkan sekolah-sekolah lainnya peran komite sekolah baru sebatas formalitas saja, dengan demikian perkembangan pendidikan yang sering tidak sejalan dengan

perkembangan zaman disebabkan oleh solidaritas budaya lokal (Rustiyah, 1982: 11) dalam hal ini pelibatan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional.

Keenam, Rasio Jam Mengajar. Semua lembaga pendidikan swasta yang diteliti ada yang sudah mengacu pada panduan yang sesuai dengan undang-undang no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 1 mencakup kegiatan pokok dan melaksanakan tugas tambahan. Pasal 35 ayat 2 tentang beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu dapat terpenuhi. Namun ada beberapa sekolah yang belum dapat memenuhinya antara lain: SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo, SMP Kristen Kartasura, dengan cara mengkompensasi dengan pengelolaan laboratorium, perpustakaan, koperasi, dan lain-lain.

Ketujuh, Sarana dan Prasarana. Semua lembaga pendidikan yang diteliti semua pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana dipenuhi oleh yayasan dan bantuan dari Pemerintah secara periodik sesuai dengan kebutuhan rasio sekolah. Dari segi kelayakan dan sarana gedung sekolah sudah representatif namun dari segi rasio sekolah swasta harus membuat kelas-kelas kecil dalam rangka pemenuhan target mengajar 24 jam.

Menurut Undang-undang No. 20/2003 Sisdiknas pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjelaskan

bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah adanya *Standar Sarana dan Prasarana* yakni mencakup sarana berupa perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, BHP. Prasarana berupa R. kelas, R. Pimpinan satuan pendidikan, R. Pendidik, R. Tata Usaha, R. Perpustakaan, R. Laboratorium, R. Bengkel Kerja, R. Unit Produksi, R. Kantin, R. instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi. Dengan demikian beberapa sekolah swasta yang diteliti memiliki standar sarana dan prasarana yang diberikan oleh undang-undang tersebut di atas.

Proporsi kewenangan sekolah dalam memanej SDM dan otonomi sekolah tentang rasio guru dengan siswa di **SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo** tergolong belum bisa memenuhi 24 jam mengajar perminggu, karena kelas dalam kelompok kecil. Jumlah keseluruhan ada 8 kelas dan kelas 1 termasuk kelas kecil. Sedangkan **SMP Kristen Kartasuro Sukoharjo**, dalam pemenuhan kesejahteraan guru sekolah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sistem penggajian guru SMP Kristen Kartasuro-Sukoharjo sepenuhnya dari yayasan. Pembinaan guru dilakukan melalui MGMP dari pengawas, kepek yang dilakukan persemester.

SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo, untuk segi kualifikasi Sumber Daya Manusia untuk guru di SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo

belum terpenuhi. Kewenangan sekolah dalam memanej SDM guru adalah rekrutmen dan mengangkat guru baru di SMP Al-Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo, sedangkan pembinaan guru dari Diknas.

SMP dan SMA Al-Firdaus Sukoharjo, kewenangan sekolah dalam memanej SDM untuk perekrutan guru dengan prosedur melalui Kepala Sekolah kemudian usulan dari Kepala Sekolah ditetapkan oleh yayasan. Supervisi/pembinaan dalam hal pembelajaran sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah, Yayasan. Di samping Kepala Sekolah dan juga Yayasan supervisi/pembinaan juga dilakukan oleh Dinas dan Depag.

SMA Veteran I Sukoharjo, proporsi kewenangan sekolah dalam penjaminan mutu sudah sesuai atau berkualifikasi, hal tersebut terlihat dengan rasio guru dan siswa yang ideal berdasar kelas standar sertifikasi (dengan ketentuan kurang lebih perkelas 30 siswa). Jumlah mengajar perguru 24 jam mengajar/minggu, bagi guru yang mengajarnya kurang dari 24 jam maka bagi kualifikasi guru IPA dikompensasikan ke pekerjaan laboratorium dan guru IPS dikompensasikan ke koperasi siswa, sedang guru informatika komunikasi dikompensasikan ke pengelolaan laboratorium komputer.

Dengan demikian dilihat dari analisis kelebihan dan kekurangannya, Sekolah swasta di Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan sekolah, kewenangan sepenuhnya lebih besar pada tingkat sekolah, meliputi: rekrut-

menentuan kualifikasi guru, kesejahteraan, rasio, supervisi dan pembinaan guru serta proporsi kewenangan memenej SDM dan perangkat kependidikan di era otonomi adalah:

- a. Kekuatannya: Sepenuhnya mandiri dalam segala hal meliputi: lembaga sekolah, kepala sekolah, guru, fasilitas dan sumber belajar, kurikulum, keuangan siswa, manajemen, sarana dan prasarana.
- b. Kelemahannya:
 - 1) Daya kompetisi melemah dengan adanya kebijakan sekolah gratis
 - 2) Relatif sulit untuk mengembangkan dan memenuhi mengajar 24 jam/minggu.
 - 3) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada umumnya lebih cenderung pilihan pertama pada sekolah negeri, baru sekolah swasta.
 - 4) Komite sekolah baru pada posisi simbul pada umumnya belum berfungsi sebagai mitra.
 - 5) Masyarakat Sukoharjo masih berpandangan pada sekolah negeri sebagai pilihan utama setelah sekolah unggulan.

Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berpijak pada pembahasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. a. *Rekrutmen* berdasar pada ketentuan kualifikasi guru dan ketentuan dari masing-masing

sekolah yang sesuai dengan visi dan misi yayasan penyelenggara pendidikan..

- b. *Pembinaan, Supervisi dan Pengawasan Guru*, telah dilakukan oleh semua sekolah dan pihak Pemerintah, baik Dinas, Depag Kabupaten maupun Dinas Propinsi, sedangkan untuk SMP dan SMA Al-Firdaus, pembinaan, supervisi dan pengawasan guru juga dilakukan oleh yayasan dan kepala sekolah, dan untuk SMA Veteran dilakukan juga oleh guru senior. Pelaksanaan pembinaan, supervisi dan pengawasan dilakukan secara rutin baik, terjadwal atau insidental.
- c. *Kurikulum yang dibebankan* oleh setiap lembaga pendidikan di atas mengacu kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bermuatan kurikulum nasional yang harus dijadikan acuan oleh setiap sekolah tetapi juga diberi kewenangan untuk mengadakan dan melaksanakan kurikulum lokal.
- d. *Pembiayaan Operasional* sekolah (sekolah, guru, dan siswa).
 - a). **Sekolah**, semua sekolah pembiayaan operasionalnya ditanggung oleh masing-masing penyelenggara (yayasan). Khusus SMP dan SMA Al-Firdaus mendapatkan dana operasional sekolah dari BOS dan Block

Grand.b). **Guru**, Guru digaji oleh Yayasan melalui sekolah sesuai dengan kriteria kemampuan dari masing-masing sekolah berdasar pada beban mengajar 24 jam/minggu, disamping itu memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah dan dana BOS. c).

Siswa, siswa memperoleh bantuan kesejahteraan murid (BKM) bagi yang tidak mampu dari masing-masing sekolah.

- e. *Rasio Jam Mengajar*. Semua lembaga pendidikan swasta yang diteliti ada yang sudah mengacu pada panduan yang sesuai dengan perundang-perundangan no. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 35 ayat 1 mencakup kegiatan pokok dan melaksanakan tugas tambahan.
 - f. *Sarana dan Prasarana*. Semua lembaga pendidikan yang diteliti semua pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana dipenuhi oleh yayasan dan bantuan dari Pemerintah secara periodik sesuai dengan kebutuhan rasio sekolah.
2. Sekolah swasta yang diteliti dalam proporsi kewenangan sekolah dalam memanaj SDM adalah cukup maksimal hal ini bisa dilihat upaya dan peran sekolah dalam perekrutan dan pembinaan serta pemenuhan kesejahteraan guru dapat dilakukan oleh pihak sekolah

b. Saran

Perlu dirintis adanya sekolah swasta unggulan untuk mitra tanding agar ada perimbangan antara sekolah swasta dengan negeri, serta adanya perubahan wawasan bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan Stakeholder.

Ucapan Terimakasih

Kegiatan penelitian tidak akan berhasil kalau tidak mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, maka ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMS atas kesempatan yang diberikan kepada kami, baik melalui dana maupun saran.
2. Dra. Chusniatun, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang dengan penuh ketulusan dan semangat telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian.
3. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., yang telah berkenan memberikan masukan dari awal proses sampai akhir pada penelitian.
4. Kepala Sekolah SMP dan SMA Swasta di Sukoharjo, yang memberikan kepada kami untuk kemudahan penelitian.

Al-qur'an dan Terjemahnya.

Abidin, Zaenal. 2007. *Model Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Inservice Training*. Surakarta: LPPM-UMS.

_____. 1997. *Kesiapan SMP dan SMA Surakarta Menyongsong KBK (Studi Kasus SMP 1 dan SMA 1, 2 Muhammadiyah Surakarta Tahun 2005-2006)*. Humaniora, Volume: 8, No. 2 Agustus 2007.

Aly, Abdullah. 2006. *Peranan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*, Surakarta: LPPM-UMS.

An Nahlawi, Abdurrahman. 1991. *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, Sekolah, Masyarakat*. Bandung: Diponegoro.

Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Fattah, Nanang. 1996. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hasbullah. 1999. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2007. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hendropuspito. 1988. *Sosiologi Agama*. Jakarta: Yayasan Kanisius.

Moleong Lexy J.. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, MB, and A.M. Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. Beverley Hills: Sage Pub.

Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 1990. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.

Ritzer, Goerge. Goodman, Dauglasj. 2003. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi ke Enam. Jakarta: Prenada Media.

Sudarman, Danim. 2000. *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tilaar, HAR. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.